

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Cekli Setya Pratiwi, *et.al*, *Penjelasan Hukum: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016)
- DPMPTSP Jawa Barat, *Survey Kepuasan Masyarakat*, (Bandung: Reswara, 2019)
- DPMPTSP Kota Manado, *Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2022*, (Manado: CV. Eco Celebes, 2022)
- DPMPTSP Kota Manado, *Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2022*, (Manado: CV. Eco Celebes, 2022)
- Dukcapil Kabupaten Situbondo, *Indeks Kepuasan Masyarakat*, (Situbondo: Dukcapil, 2020)
- Jonker Sihombing, *Investasi Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2008)
- Kasmir & Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *“AKUNTABILITAS” Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*, (Jakarta: LAN, 2015)
- Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Nuryanti Mustari, *Pemahaman KEBIJAKAN PUBLIK: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Salim H.S., *Hukum Investasi di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

### Jurnal

- Agung Nurrahman, *et.al*, “Kompetensi Aparatur Layanan Perizinan *Online Single Submission* Di Kota Bogor”, *Widya Praja*, Vol. 47, (2021): 34-51. DOI: <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1939>
- Agung Sudjati Winata, “Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara”, *Ajudikasi*, Vol. 2, (2018): 127-136. DOI: <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.902>
- Alih Aji Nugroho, *et.al*, “Analisis Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Di Pemda Kabupaten Jayapura Tahun 2019”,

- Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 17, (2020): 242-254. DOI: <https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.591>
- Angelita Paath, *et.al*, “Manajemen Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado”, *Eksekutif*, Vol. 3, (2019): 1-10. DOI: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23861>
- Ardiana Hidayah, “Landasan Filosofis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia”, *Solusi*, Vol. 16, (2018): 216-226. DOI: <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.114>
- Bambang Suryantoro dan Kusdyana, “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya”, *Baruna Horizon*, Vol. 3, (2020): 223-229. DOI: <https://doi.org/10.52310/jbhorizon.v3i2.42>
- Dryon Taluke, *et.al*, “Analisis Prefrensi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Pesisir Pantai Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat”, *Jurnal Spasial*, Vol. 6, (2019): 531-540. DOI: <https://doi.org/10.35793/sp.v6i2.25357>
- Frits Marannu Dapu, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Investasi Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”, *Lex Crimen*, Vol. 3, (2014): 83-90. DOI: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/5302>
- Hadi Haerul Hadi, “Undang-Undang Penanaman Modal Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3, (2016): 74-91. DOI: <https://doi.org/10.59635/jihk.v3i2.102>
- Harsini, “Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru”, *Jurnal Niara*, Vol. 10, (2018): 65-71. DOI: <https://doi.org/10.31849/ni.v10i2.1903>
- Johan Hursepuny, “Penanaman Modal Dan Permasalahannya Di Indonesia”, *JISAMAR*, Vol. 3, (2019): 72-78. DOI: <http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar/article/view/92>
- Kadek Cahya Susila Wibawa, *et.al*, “Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, (2019): 218-234. DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, (2020): 20-33. DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

- M. Makhfudz, "Seberapa Penting Investasi Asing Dipertahankan Di Indonesia", Adil, Vol. 7, (2016): 18-35. DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.330>
- Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat", Khazanah Hukum, Vol. 2, (2020): 92-99. DOI: <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>
- Putu Eka Trisna Dewi dan Ni Ketut Wiratny, "Urgensi Kebijakan Penanaman Modal Non Fiskal Terkait Fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Bidang Keimigrasian Di Indonesia", Aktual Justice, Vol. 3, (2018): 13-29. DOI: <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i1.557>
- Stenly Rini Larono, "Analisis Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Perijinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepulauan Talaud", Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS), Vol. 1, (2020): 18-32. DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.217>
- Syifaa Afelyna Suryoputri dan Sri Nurhari Susanto, "Analisis Tingkat Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Asas Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima", Administrative Law & Governance Journal, Vol. 5, (2022): 239-252. DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v5i3.239%20-%20252>
- Uchaimid Biridlo'I Robby dan Wiwin Tarwini, "Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui *Online Single Submission* (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi", Administratio, Vol. 10, (2019): 51-57. DOI: <https://doi.org/10.23960/administratio.v10i2.98>
- Viktor Handrianus Pranatawijaya, *et.al*, "Penerapan Skala Likert dan Skala Dikotomi pada Kuesioner Online", Jurnal Sains dan Informatika, Vol. 5, (2019): 128-137. DOI: <https://doi.org/10.34128/jsi.v5i2.185>
- Yuli Tirtariandi El Anshori, *et.al*, "Implementasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu", Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 12, (2014): 229-240. DOI: <http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v12i1.2212>

### Hasil Penelitian

- Ainia Salsabila, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan Audit Dan *Gender* Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor Internal: Studi Empiris Pada Inspektorat Wilayah Provinsi DKI Jakarta". Skripsi, Jakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011
- Fatah Hidayat, "Kinerja Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Kabupaten Banyuwangi". Tesis, Jember: Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2018

Khelen Christine, “Kewenangan BKPM Dalam Perizinan Investasi Pasca Kebijakan *Online Single Submission* di Kota Batam”. Skripsi, Batam: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2019

Nurefni Wahyuni Rambhe, “Pelayanan Perizinan Berbasis *Online* Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau”. Skripsi, Tanjungpinang: Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022

Sri Lestari, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)”. Skripsi, Surakarta: Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708)

Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado (Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2019 Nomor 1)

Peraturan Daerah Kota Manado No. 7 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2017 Nomor 7)

Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado (Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2016 Nomor 2)

Peraturan Walikota Manado Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado Tipe A (Berita Daerah Kota Manado Tahun 2019 Nomor 8)

### Website

BAKRI Universitas Medan Area, “Asas Pelayanan Publik”.  
<https://bakri.uma.ac.id/asas-pelayanan-publik/>, diakses pada 27 September 2023

BAKRI Universitas Medan Area, “Jenis Pelayanan Publik”.  
<https://bakri.uma.ac.id/pengelompokan-jenis-pelayanan-publik/>, diakses pada 27 September 2023

BAPPENAS, “Buku I RPJMN Tahun 2010-2014”.  
[https://bappeda.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2013/11/RPJMN2010\\_2014\\_Buku1\\_PrioritasNasional.pdf](https://bappeda.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2013/11/RPJMN2010_2014_Buku1_PrioritasNasional.pdf), diakses pada 25 September 2023

Dhaniswara K. Harjono, “Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”.  
<http://repository.uki.ac.id/1026/1/Hukum%20Penanaman%20Modal.pdf>, diakses pada 25 September 2023

DPMPTSP Provinsi Banten, “Perubahan Penanaman Modal Asing Dalam Negeri Menjadi Penanaman Modal Asing”.  
<https://dpmptsp.bantenprov.go.id/berita/perubahan-penanaman-modal-asing-dalam-negeri-menjadi-penanaman-modal-asing>, diakses pada 26 September 2023

Nanda Akbar Gumilang, “Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, dan Fungsinya”.  
<https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/>, diakses pada 11 Oktober 2023

Qotrun A, “Rumus Slovin: Definisi, Contoh Soal, Beserta Pemahaman Mengenai Populasi dan Sampel Dalam Penelitian”.



[https://www.gramedia.com/literasi/rumus-slovin/#Apa\\_Itu\\_Rumus\\_Slovin](https://www.gramedia.com/literasi/rumus-slovin/#Apa_Itu_Rumus_Slovin), diakses pada 25 Januari 2024

Ruang Hukum, “Perbedaan PMA dan PMDN yang Wajib Kamu Ketahui”.  
[https://ruanghukum.co.id/publication/perbedaan-pma-dan-pmdn-yang-wajib-kamu-ketahui#:~:text=Penanaman%20Modal%20Dalam%20Negeri%20\(PMDN,dengan%20mengandalkan%20modal%20dalam%20negeri](https://ruanghukum.co.id/publication/perbedaan-pma-dan-pmdn-yang-wajib-kamu-ketahui#:~:text=Penanaman%20Modal%20Dalam%20Negeri%20(PMDN,dengan%20mengandalkan%20modal%20dalam%20negeri), diakses pada 26 September 2023

Simpatik JABAR, “Gambaran Umum Unit Kerja”.  
<https://dpmptsp.jabarprov.go.id/jo/faq/#:~:text=Dinas%20PMPTSP%20mempunyai%20tugas%20pokok,sistem%20informasi%20penanaman%20modal%2C%20serta>, diakses pada 11 Oktober 2023

### **Kamus**

Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Ralona M, Kamus Istilah Ekonomi Populer, (Jakarta: Gorga Media, 2006)

